



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOOR FARID
2. Jabatan : WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 694185

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.145.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/65 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 263 m2/74 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/170 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/70 m2 di KAB / KOTA JEPARA, Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **564.200.000**

1. MOBIL, SUZUKI FORSA Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, KIJANG INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
4. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



5. MOBIL, TOYOTA YARIS TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
8. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	60.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.737.336
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.814.937.336
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.784.937.336

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.